

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WAKAF UANG DI KABUPATEN TANAH DATAR

Elimartati

Fakultas Syariah Islam IAIN Batusangkar
Jl. Jenderal Sudirman No. 137, Kuburajo, Lima Kaum Batusangkar
e-mail: elimartati2013@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the policy of local government and people of Tanah Datar Regency in exploiting its potential, opportunity, human resources and challenges in increasing money waqf empowerment. The research method used was qualitative. The techniques used in collecting empirical data in the field were interviews and documentation. The findings of the research indicate that the guidelines for implementation of waqf and can be used as a foothold in the management and empowerment of money waqf. The potential of empowerment of money waqf in Tanah Datar Regency can be enhanced by strengthening the wakaf regulation in the regions, establishment of business partners, strengthening the quality of human resources with sharia insight, and adequate financial support. Policy can be done by cooperating with various parties, such as local government, syariah financial institutions (LKS), non-governmental organizations (NGOs), companies and others.*

Kata kunci: wakaf uang, kebijakan, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan (Friedrich, 2007: n.d.). Kebijakan itu adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah, tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Suatu kebijakan memberikan batas-batas keputusan. Kebijakan yang penulis maksud adalah usaha atau upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Wakaf merupakan dana sosial yang potensial bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi sosial wakaf merupakan aset yang amat bernilai (Efendi, 2004: 409) sebagai sumber ekonomi. Sedangkan fungsinya sebagai ibadah, merupakan amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis : (Muhammad al-Syaukany) :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم: قال إدامات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah Ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda "apabila mati seorang manusia (anak adam) maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdo'a untuk orang tuanya. (HR. Bukhari).

Wakaf uang sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Di Indonesia wakaf secara umum merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat. Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Kolonial Belanda. Pernah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, tanggal 4 juni 1931 No. 136/A, tanggal 24 Desember 1934 No. 1361 No. 3088/A dan tanggal 27 mei 1935 N0. 1273/A. (Depag RI, 2007 : 3-4). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk penyempurnaan hukum materi tentang wakaf berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Presiden menetapkan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2004 disyahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Salah satu tujuan peraturan yang dikeluarkan tentang wakaf adalah untuk mengamankan, mengatur dan mengelola harta wakaf secara baik agar lebih terjaga dan terawat serta memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun kenyataannya secara faktual banyak harta wakaf yang

tidak terawat dan terkelola secara baik, termasuk wakaf uang yang sudah lama berjalan dalam masyarakat. Tetapi wakaf uang ini belum terkelola sebagai mana yang telah di atur dalam peraturan wakaf dan belum termanfaatkan secara maksimal.

Potensi wakaf uang yang ada di Tanah Datar bila dikelola secara baik dan diproduktifkan, tentunya akan memberikan manfaat ekonomi yang besar terhadap masyarakat. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Pasal 42 UU No 41 tahun 2004). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Nazhir wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wakaf meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Potensi wakaf uang yang dikelola secara baik dan profesional akan menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimana kebijakan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah di kabupaten Tanah Datar. Kenapa potensi wakaf uang di Tanah Datar belum terberdayakan sebagaimana mestinya sehingga masih sedikit wakaf yang bersifat produktif. Bagaimana peluang dan sumberdaya manusianya dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Kabupaten Tanah Datar, apakah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelola wakaf dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang ada, dan siapa yang melakukannya serta apa program dan upaya yang dilakukan oleh para pelaku. Bagaimana pengelola dan pengawas benda wakaf dalam rangka peningkatan pengelolaan dan produktifitas wakaf di Tanah Datar. Apa hambatan atau tantangan dalam meningkatkan pemberdayaan dan produktifitas wakaf di Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Tanah Datar masyarakatnya agamis, penduduk asli dari wilayah ini tidak ada yang menganut selain agama Islam dan masyarakatnya mempunyai falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan merupakan salah satu sumber dana dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian berkaitan wakaf uang . Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa Wawancara dengan pegawai Kementerian Agama Tanah Datar dan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Tanah Datar, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar, serta studi dokumentasi. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengadakan inventarisasi terhadap masalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya menentukan lokasi penelitian dan sumber data dari penelitian ini. Langkah berikutnya adalah membuat daftar

wawancara dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan serta mengumpulkan dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dan kemudian data yang ada diinterpretasikan, dibahas dan disimpulkan, terakhir data yang telah diolah dideskripsikan dan dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kajian Teori

Teori tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Tentang kebijakan (*policy*), Terry (1977) menyatakan bahwa: *A policy defines the area in which decisions are to be made, but it does not give the decision. Policies spell out the sanctioned, general direction and areas to be followed. A policy is a verbal, written, or implied overall guide setting up boundaries that supply the general limits and direction in which managerial action will take place.* Kebijakan dapat didefinisikan sebagai area suatu keputusan dibuat, oleh karena itu kebijakan itu tidak memberikan keputusan yang pasti. Kebijakan memberikan arah yang bersifat umum, dan area yang harus diikuti. Kebijakan bisa lisan, atau tertulis yang memberikan arah dan batasan secara umum kepada manager untuk bertindak.

Coulter & Robbins (1999) menyatakan bahwa *"policy is a guide that establish parameters for making decisions"*. Kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan

untuk membuat keputusan. Rue & Byars (2000) menyatakan bahwa policy adalah: *"general guide to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate"*. Kebijakan adalah merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. Policy tidak menunjukkan secara pasti kepada seluruh anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak.

Friedrich (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Modul LAN, 2015). Selanjutnya dalam hal kebijakan pemerintah, George C Edward III (1978) memberikan definisi kebijakan negara adalah sebagai berikut. *"Policy is government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program."* Kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program yang diusulkan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa, pada dasarnya kebijakan itu adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah, tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Suatu kebijakan memberikan batas-batas keputusan boleh dan tidak boleh dibuat dan juga hanya memberikan

batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak.

2. Jenis Kebijakan

Berdasarkan Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (LAN, 2014) jenis-jenis kebijakan public adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu, misalnya kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui kebijakan beras miskin. Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Kebijakan bersifat lebih teknis, tentang standar dan prosedur (atau *Standard Operating Procedure*), kriteria warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan.
- b. Kebijakan distributif, kebijakan regulatif, dan kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumber daya tertentu, misalnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, misal kebijakan menggunakan sabuk pengaman jika mengendarai atau menjadi penumpang dalam mobil. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur pendistribusian pendapatan atau kekayaan seseorang, untuk didistribusikan kembali kepada kelompok yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan, misal kebijakan pajak progresif,

kebijakan subsidi silang, kebijakan subsidi BBM.

- c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan sumber daya yang kongkrit pada kelompok tertentu, misal kebijakn beras untuk orang miskin. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat dan penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya kebijakan libur Natal untuk orang beragama Kristen/Khatolik, libur Waisak untuk menghormati orang beragama Budha, atau libur Idul Fitri untuk menghormati orang beragama Islam.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (*public goods*) dan barang privat (*private goods*). Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik/fasilitas umum, jalan raya. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang privat, misalnya pengaturan parker, penataan pemilikan tanah.

Kebijakan dilihat dari segi fungsinya, terdapat tiga jenis kebijakan, yaitu kebijakan yang bersifat responsif, futuristik, dan antisipatif. Kebijakan responsif adalah suatu kebijakan yang dibuat karena merespons permasalahan yang muncul. Contoh, ada masalah bencana alam, lalu dibuatlah kebijaan untuk menanganinya. Kebijakan futuristik adalah kebijakan yang dibuat untuk

memberdayakan potensi, dan mencapai tujuan masa depan. Contoh dalam menghadapi kompetensi abad 21, kebijakan pendidikan seperti apa yang harus dibuat. Kebijakan antisipatif adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya suatu masalah di masa depan. Contoh, telah terjadi pembabatan hutan yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut kebijakan apa yang perlu dibuat supaya hutan yang sudah habis tidak menimbulkan bahaya.

3. Kebijakan yang Baik

Berdasarkan berbagai referensi yang dikaji, (Sugiono, 2017: 6) dapat dikemukakan di sini bahwa kebijakan yang baik adalah:

- a. Dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan *up-to-date*. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal.
- b. Kebijakan yang dibuat, harus terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovatif, kreatif dan fleksibel).
- c. Tujuan kebijakan adalah untuk memecahkan masalah, antisipasi masalah, membawa kemajuan organisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kebijakan harus adil. Kebijakan dibuat tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan warga organisasi atau masyarakat dalam suatu negara.

- e. Kebijakan dirumuskan dengan kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
- f. Kebijakan dibuat untuk waktu yang relatif lama, sehingga tidak sering ganti kebijakan yang akan membingungkan masyarakat.
- g. Kebijakan harus selalu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (*inclusive*).
- h. Kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara mudah dengan didukung sumber daya manusia dan sumber daya lain yang memadai.
- i. Sebelum kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka perlu diujicoba terlebih dahulu, sehingga akan dapat diketahui kelemahan dalam pemahaman dan pelaksanaan. Dengan demikian kebijakan yang akan diimplementasikan telah teruji efektivitas dan efisiensinya.
- j. Kebijakan yang telah diputuskan harus konsisten dilaksanakan. Dalam ungkapan Jawa, "*sabdo pandito ratu datan keno wola-wali*". Kebijakan raja harus tidak boleh plin-plan, tidak boleh mencla-mencle, tidak boleh dirubah. Oleh karena itu kebijakan harus dibuat secara rasional, hati-hati dan teliti, sehingga setelah diputuskan tidak dirubah lagi dan harus dilaksanakan.
- k. Kebijakan yang telah diimplementasikan harus dimonitor pelaksanaannya dan diukur hasil dan outcome-nya.
- l. Kebijakan harus dapat merubah perilaku positif orang-orang yang dikenai kebijakan tersebut.

m. Belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal .

Berdasarkan indikator kebijakan yang baik tersebut, maka peran penelitian kebijakan menjadi sangat penting, terutama dalam menyiapkan data yang lengkap, akurat dan up-to-date sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan, serta melakukan ujicoba kebijakan sebelum diputuskan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan.

Teori tentang Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang/badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No: 1 tahun 1991 pasal 215 (1) mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa perbedaan maksud wakaf antara satu sama lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dikategorikan kepada harta benda wakaf hanyalah berupa tanah milik saja. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf telah mengalami perkembangan, karena yang dikategorikan sebagai harta benda wakaf adalah benda milik yang diwakafkan untuk selama-lamanya bukan hanya tanah milik saja, sedangkan dalam *"Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang bisa dijadikan harta benda wakaf adalah benda milik yang dalam undang-undang ini lebih dijelaskan secara spesifik dan wakaf itupun boleh untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu"*.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah penyerahan atau pemberian hak milik yang bersifat kekal bendanya, dan tidak boleh dilakukan perpindahan milik, serta manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum yang mengharapkan keridhaan Allah Swt. Dengan demikian harta wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan asalnya. Dalam kondisi tertentu wakaf

dapat dilakukan untuk sementara waktu.

Berdasarkan uraian wakaf di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa:

- a. Harta wakaf keluar atau terputus dari hak milik orang yang mewakafkan dan menjadi milik Allah atau umum. Begitulah menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.
- b. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja, sedangkan bendanya (aslinya) harus tetap atau utuh.
- c. Kegunaan wakaf adalah untuk *fi sabilillah* yaitu sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (syariat).
- d. Boleh mewakafkan manfaat suatu benda.
- e. Wakaf dilakukan untuk selama-lamanya dan dapat juga untuk sementara.

2. Jenis-jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis-jenis harta benda wakaf di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Benda tidak bergerak adalah
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyangberlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Benda bergerak dalam undang-undang adalah harta benda wakaf yang tidak habis karena dikonsumsi, yang meliputi:
 - 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa, dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf.

Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum..

4. Nazhir Wakaf

Nazhir menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 (4) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wakaf meliputi Perseorangan, Organisasi, atau Badan hukum. Syarat-syarat Nazhir:

- a. Nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Nazhir organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan; pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan., organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- c. Nazhir badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kewajiban dan hak nazhir:

a. Kewajiban Nazhir

Nazhir sebagai pemegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf, mempunyai beberapa kewajiban, dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dipertegas dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa Nazhir mempunyai tugas-tugas, antara lain:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

b. Hak Nazhir

Hak Nazhir diberikan apabila ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Nazhir, Nazhir melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan haknya berupa upah atau imbalan, sebagaimana yang terdapat dalam hadits tentang wakaf Umar yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa orang yang mengurus harta wakaf juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), dengan pemberian imbalan yang pantas bagi Nazhir, maka diharapkan pemeliharaan dan pengurusan dari harta wakaf akan dapat berjalan dengan baik, selain itu diharapkan pula bahwa dengan imbalan tersebut dapat dihindari adanya penyimpangan terhadap penggunaan harta itu sendiri.

5. Pemberdayaan dan Produktifitas Harta Benda Wakaf

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengelola dan

memberdayakan harta benda wakaf, adalah:

- a. Memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif.
- b. Menghimpun dana wakaf.
- c. Menginvestasikan harta wakaf. tersebut untuk kepentingan umat.
- d. Menyalurkannya ke arah yang tepat.
- e. Agar harta wakaf itu bisa dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah).

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 42-46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dipertegas dengan Pasal 45-48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Perubahan peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: Ayat (1) "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia" Ayat (2) "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf"

Khusus berkenaan dengan wakaf uang, diperkuat juga adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Secara terperinci Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002

M yang isinya menetapkan/menfatwakan sebagai berikut:

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf Uang hanya dibolehkan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* ().
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Eficandra, dkk., 2017: 139).

Pelaksanaan wakaf uang juga didukung oleh beberapa peraturan lainnya, yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 92, 93, 94, 95, dan 96 Tahun 2008, Nomor 14, 80, 81, 82, 177, 178, dan 179 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang, Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor Dj.II/420 tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, serta 11 buah Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkaitan secara teknis tentang pengelolaan wakaf uang dan panduan bagi BWI sebagai lembaga independen untuk memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang (Eficandra, dkk., 2017: 139-140).

Hasil Penelitian

Masyarakat Tanah Datar dikenal agamis, karena memegang teguh ajaran agamanya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dalam ungkapan "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ASB_SBK). Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang agamis dan mempunyai falsafah ABS SBK merupakan potensi bagi masyarakatnya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan wakaf uang. Masyarakatnya tentu akan mendukung kebijakan dan program tentang produktifitas dan pemberdayaan wakaf.

Adanya wacana dan semangat gerakan wakaf uang sebagai salah satu usaha pembaharuan dan pemberdayaan wakaf benda tak bergerak saat ini disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat dan umat Islam di Indonesia, tak ketinggalan juga di Kab. Tanah Datar. Wacana dan semangat gerakan wakaf uang sebagai produk baru dalam sistem perwakafan, jika diimplementasikan dengan potensi yang ada di Kab. Tanah Datar melalui adanya Surat Edaran Bupati, maka secara sederhana dalam hitungan ekonomi dan keuangannya potensi wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut (Eficandra, dkk., 2017: 140):

Tabel. 1.
Potensi Wakaf Uang di Kabupaten Tanah Datar

| No | Wakif | Jumlah Wakif | Nilai Wakaf/ Minggu | Nilai Wakaf/ Bulan | Potensi Wakaf/ Bulan | Potensi Wakaf/ Tahun |
|----|--------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | * PNS Daerah | 6.192 | | Rp 10.000 | Rp 61.920.000 | Rp 743.040.000 |
| | * PNS Pusat | 1.750 | | Rp 10.000 | Rp 17.500.000 | Rp 210.000.000 |
| 2 | Wiraswasta | 1.000 | | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | Rp 120.000.000 |
| 3 | Perantau | 250 | | Rp 50.000 | Rp 12.500.000 | Rp 150.000.000 |
| 4 | Pelajar; | 76.165 | | | Rp 362.016.000 | Rp 4.344.192.000 |
| | * MI | 916 | Rp 1.000 | Rp 4.000 | Rp 3.664.000 | Rp 43.968.000 |
| | * SD | 41.033 | Rp 1.000 | Rp 4.000 | Rp 164.132.000 | Rp 1.969.584.000 |
| | * MTs | 7.241 | Rp 1.000 | Rp 4.000 | Rp 28.964.000 | Rp 347.568.000 |
| | * SMP | 12.636 | Rp 1.000 | Rp 4.000 | Rp 50.544.000 | Rp 606.528.000 |
| | * MA | 2.592 | Rp 2.000 | Rp 8.000 | Rp 20.736.000 | Rp 248.832.000 |
| | * SMA | 8.642 | Rp 2.000 | Rp 8.000 | Rp 69.136.000 | Rp 829.632.000 |
| | * SMK | 3.105 | Rp 2.000 | Rp 8.000 | Rp 24.840.000 | Rp 298.080.000 |
| 5 | Mahasiswa | 5.000 | Rp 2.000 | Rp 8.000 | Rp 40.000.000 | Rp 480.000.000 |
| 6 | Jamaah | 1.500 | | Rp 5.000 | Rp 7.500.000 | Rp 90.000.000 |
| | | Jumlah | | | Rp 511.436.000 | Rp 6.137.232.000 |
| | | Asumsi Ketercapaian Target (70%) | | | Rp 358.005.200 | Rp 4.296.062.400 |
| | | Total Pencapaian (5 Tahun) | | | | Rp 21.480.312.000 |

Sumber: Eficandra, dkk., Proceeding: Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN Batusangkar, Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition "Cash Waqf as an Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)" 2017: 140

Data di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf uang dengan asumsi ketercapaian target "hanya" 70 % akan berjumlah Rp. 4.296.062.400,- per tahun dan Rp. 21.480.312.000,- selama 5 tahun. Kajian dan analisis lebih lanjut menggambarkan bahwa angka ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa sebagai modal/investasi untuk menggerakkan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar. Sebahagian saja dari dana

wakaf uang tersebut (40 % s/d 50 %) diperuntukkan untuk pemanfaatan tanah wakaf yang selama ini belum maksimal dan optimal penggunaannya, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan serta memberdayakan ekonomi umat sesuai dengan potensi pengembangan tanah wakaf yang ada. Nilai-nilai *marketable*, humanis, kebutuhan dan kemaslahatan umat, serta keberlanjutan program dalam pengembangannya

senantiasa menjadi perhatian dan skala prioritas (Eficandra, dkk., 2017: 140-141).

1. Peluang Pemberdayaan dan Produktif Wakaf Uang
 - a. Fleksibelitas konsep fikih wakaf.
 - b. Peluang reinterpretasi paham wakaf.
 - c. Kekayaan benda- benda wakaf.
 - d. *Booming* sistem ekonomi syariah.
 - e. Menguatnya kualitas SDM berwawasan Syariah.
2. Strategi Pemberdayaan dan Produktifitas Wakaf
 - a. Regulasi peraturan perundangan perwakafan.
 - b. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Tanah Datar berdasar surat keputusan Badan Pelaksana BWI Nomor 022/BWI/P-BWI/2015.
 - b. Optimalisasi Undang- Undang otonomi daerah dan PERDA Syariah.
 - c. Pembentukan kemitraan usaha.
 - d. Penerbitan sertifikat wakaf tunai.
 - e. Penerbitan sertifikat wakaf investasi.
3. Hambatan dan Tantangan
 - a. Paham umat Islam tentang wakaf.
 - b. Jumlah harta wakaf Strategis dan Kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif.
 - c. Banyaknya potensi wakaf uang yang belum bersertifikat.
 - d. Nazhir wakaf masih tradisional – konsumtif.
4. Pengembangan
 - a. Program jangka pendek
 - 1) Investasi/Deposito pada Lembaga keuangan Syariah.
 - 2) Investasi pada produk sukuk Syariah.
 - b. Program jangka menengah

- 1) Investasi pada prolyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat.
- 2) Penanaman saham di Pasar Modal Syariah.
- c. Program jangka panjang
 - 1) Pembangunan pusat bisnis/ swalayan / mini *mart*/ ruko.
 - 2) Pembangunan sekolah surau bagi pelajar/ mahasiswa.
 - 3) Pembangunan wisma/hotel.
5. Kelemahan dalam pengelolaan wakaf uang antara lain :
 - a. Kebekuan paham masyarakat terhadap wakaf

Paham masyarakat yang jujur dengan apa adanya dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya di masa awal pelaksanaan wakaf, pada kondisi sekarang memunculkan persoalan mengenai *validitas legal* tentang harta wakaf yang mengakibatkan harta wakaf tidak mempunyai bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa wakaf uang belum teradminstrasi secara baik dan benar sesuai dengan ilmu akuntansi syariah.
 - b. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang rendah

Hasil pendataan yang dilakukan terdapat minat dan pengetahuan masyarakat berwakaf uang sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia masih rendah
 - c. Sumberdaya manusia pengelola wakaf sangat rendah

Pengelolaan wakaf uang produktif, sangat ditentukan keberhasilannya oleh sumberdaya Nazhir wakaf data yang diperoleh

dari lokasi penelitian menjelaskan bahwa nazir wakaf keberadaannya hanya sekedar memenuhi persyaratan, belum terberdayakan sebagai mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- d. Dukungan pemerintah daerah terhadap perwakafan uang rendah

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sangat ditentukan keberhasilannya dari perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.

- e. Pemahaman terhadap peraturan pungutan liar yang debatebel

Adanya aturan yang melarang institusi untuk memungut dana dari masyarakat menjadi masalah dan menjalankan program penghimpunan wakaf uang.

Adapun model dan bentuk pemberdayaan: *Pendirian Shariah Bussines Centre/ Wakaf Centre*, dapat dilakukan di mesjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren yang terletak di posisi strategis sebagai pusat bisnis. Lahannya berasal dari asset tanah wakaf, sedangkan biaya pembangunan gedungnya berasal dari dana wakaf uang. Hasil dari pengelolaan dan sewa gedung tersebut dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukan wakaf dan peningkatan kesejahteraan umat serta pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya dana ini dapat menjadi dana pengembangan dan pemeliharaan masjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren yang selama ini hanya mengandalkan dana *infaq* dan *shadaqah*. Pendirian lembaga keuangan mikro syariah juga merupakan salah satu alternatif dari pemanfaatan tanah wakaf yang ada, terutama yang berdampingan

dengan mesjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren. Pembangunan /penyewaan tempat sebagai pusat aktifitasnya serta permodalan yang berasal dari dana wakaf uang diharapkan akan dapat membantu dan memberdayakan ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah (Eficandra, dkk., 2017: 142).

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan data di lapangan dan kemudian diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa potensi pemberdayaan wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar dapat ditingkatkan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan regulasi peraturan perundangan wakaf di daerah
2. Pembentukan mitra usaha
3. Penguatan kualitas SDM berwawasan syariah
4. Dukungan keuangan yang cukup

Dukungan kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, Lembaga keuangan Syariah (LKS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, dan lain-lain.

Saran

Mengoptimalkan program pemberdayaan wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar disarankan:

1. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat menetapkan kebijakan tentang peningkatan dan pemberdayaan tentang pengelolaan wakaf uang, serta

mensosialisasikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf kepada Nazhir Wakaf dan masyarakat.

2. Pihak yang berwenang agar melakukan pengantian Nazhir wakaf dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad. 2015. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2,, Jakarta.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve.
- Daud Ali, Muhammad. 1998. *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.
- _____. 2007. *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____. 1996. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- _____. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____. 2007. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Depdikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eficandra, dkk., 2017. *Proceeding: Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN Batusangkar: Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition "Cash Waqf as an Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)"*, Batusangkar: IAIN Batusangkar Press.
- Efrison, tth. *Pesona dan Profil Luhak Nan Tuo, Kantor Inforkom dan PDE Tanah Datar*, Batusangkar: tt.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press.
- Junaidi, Achmad. 2007. *Thobeib Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.

- Kahlani, Muhammad bin Ismail, tth. *Subul al- Salam*, Dahlan , Bandung: tt.
- KANDEPAG Kabupaten Tanah Datar. 2009. *Laporan Perkembangan Harta Wakaf Kabupaten Tanah Datar*, Batusangkar: tt.
- Khatib, Syarbaini. 1978. *Mungni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al- Fikr.
- M. Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar Bidang Ekonomi Islam. 2016. *Gerakan Wakaf Uang LuhAK Nan tuo*.
- S. Praja, Juhaya. 1995. *Perwakafan di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977)*, Bandung: Yayasan Piara.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo : Dar al-Fath, 1983)
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&d, dan Penelitian Evaluasi*. Badung: Alfabeta.
- Syaukani. Tth. *al-Nail al- Authar*. Dar al-Fikr: tt.